

## **ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**Mufti Nawang Prastiko, Achmad Suprianto**

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Malang 65145

E-mail: [muftinawangprastiko@gmail.com](mailto:muftinawangprastiko@gmail.com)

**Abstrak:** Kebijakan publik dan kebijakan pendidikan mempunyai peran penting dalam lembaga pendidikan dan masyarakat dimana mereka diatur oleh sebuah peraturan yang dibuat pemerintah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan jenis kebijakan publik dan kebijakan pendidikan yang menggunakan metode SWOT. Serta Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi yang diambil dari internet: artikel. Pembahasan yang dimulai dari kurikulum dan kebijakan publik Undang-Undang, dan dianalisis mana yang termasuk kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman lalu mencari bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pendidikan di Indonesia yang bisa masih dibilang belum sempurna.

**Kata kunci:** analisis kebijakan publik, kebijakan pendidikan

Setiap manusia pasti ingin mewariskan suatu aturan-aturan kepada generasi selanjutnya. Menurut Imron (2012) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ciri khas dari seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan. Kebijakan publik adalah suatu kebijakan di mana pemerintah mengatur tentang alokasi sumber daya manusia dan non manusia seperti: anggaran, mesin, teknologi, bahan-bahan atau material. Dalam penyusunan kebijakan publik terdapat berbagai elemen yang berperan sebagai penyusun kebijakan tersebut. Yang dalam penyusunan tersebut terdapat berbagai kepentingan orang banyak serta berbagai macam pemikiran yang ada seperti: kepentingan individu maupun oligarki, teori-teori, dan ideologi. Yang di mana penyusunnya terdapat lembaga Legislatif (DPR) yang mempunyai tugas politik pusat dalam penyusunan dan pembuatan aturan atau kebijakan dalam sistem politik.

Eksekutif (Presiden) mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan publik dalam penyusunan biasanya terdapat berbagai komisi presidensial dan keikutsertaan susunan kabinet. Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial) mempunyai peran penting dalam pengesahan kebijakan publik apabila kebijakan tersebut berlawanan dengan konstitusi, Lembaga Yudikatif dapat membatalkan maupun mengesahkan kebijakan tersebut. Dalam penyusunan kebijakan publik harus berpikir secara objektif apa yang menjadi permasalahan dan dapat dituangkan dalam saat penyusunan kebijakan tersebut. Bisa dibilang kebijakan publik merupakan alat yang digunakan untuk mengatur berbagai kepentingan seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan di mana semua itu untuk kepentingan rakyat. Kebijakan Pendidikan merupakan suatu alat yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan yang mengatur tentang pendidikan bagaimana cara melakukannya, seperti apa urutan kegiatannya, dan bagaimana hasil akhir terhadap pendidikan di Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan kajian analisis dari berbagai sumber buku, internet, artikel, dan jurnal. Hal ini digunakan untuk analisis tanpa mencari data dengan terjun ke lapangan. Di artikel ini membahas tentang kebijakan publik dan kebijakan pendidikan. Menurut Muhson (2006:1) menyatakan bahwa analisis data adalah sebuah metode dalam suatu proses penelitian yang dilaksanakan setelah semua data yang diperoleh akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Setelah ini akan dibahas menggunakan metode deskriptif yang di mana pengertiannya Menurut Sugiyono (2011:147), metode analisis deskriptif adalah “metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan

menggolongkan data yang telah dikumpulkan sesuai apa adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan baru yang bersifat umum atau mengeneralisasikannya.

Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data sekunder, Menurut Sugiyono dalam Ahdiani (2013) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Ada berbagai jenis bentuk dokumen seperti: (1) gambar; (2) catatan; (3) karya yang semuanya dibuat maupun didokumentasikan oleh seseorang. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan meneliti untuk mendapatkan data untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi data yang dicari di internet. Menurut Moleong dalam Budiman (2015:68) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah salah satu metode dalam suatu penelitian pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan menganalisis dokumen yang ada dalam penyimpanan yang dibuat oleh seseorang.

Dalam artikel ini menggunakan teknik analisis data berupa metode SWOT proses dimulai dengan mengidentifikasi, merumuskan suatu kebijakan, suatu rencana, dan suatu proyek skala besar maupun kecil dengan menilai serta memaparkan faktor dalam dan luar yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Kemudian dipilih faktor mana yang membantu dan mana yang tidak mendukung dalam rencana yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pedoman dasar di analisis SWOT adalah membandingkan kondisi tertentu dengan kondisi yang lainnya yang sama maupun berbeda. (1) *strength*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kekuatan dan kelebihan; (2) *weakness*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kelemahan dan kekurangan; (3) *opportunity*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa peluang; (4) *threats*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa ancaman. Kemudian dilakukan analisis berbagai data yang telah diperoleh setelah selesai menganalisis lalu menetapkan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **HASIL**

Artikel ini menekankan pada kebijakan pendidikan kurikulum 2013. Menurut Susilana dalam Dahlan (2014) Menyatakan bahwa kurikulum berasal dari dunia olahraga, yakni curir (pelari) dan curere (tempat mulai), yang dimaknai sebagai jarak yang harus dicapai oleh seorang pelari mulai dari garis awal mula sampai selesai untuk mendapatkan sebuah hadiah. Kurikulum 2013 dibuat untuk mengembangkan, mengembangkan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan keterampilan (kognitif) peserta didik. Yang diutamakan dalam perkembangan kurikulum 2013 adalah perkembangan pola pikir, penguatan pengelolaan kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, proses belajar yang diperkuat, dan penyesuaian beban belajar agar dapat disesuaikan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan di awal.

Kebijakan publik seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 4 menyatakan Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; pasal 6 menyatakan (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan pendidikan ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT. (a) kelebihan kebijakan pendidikan: (1) Pendidikan sekarang memfokuskan pada murid yang sebelumnya memfokuskan terhadap guru, (2) siswa diharuskan untuk menjadi kreatif,

inovatif, dan aktif untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di kegiatan belajar, (3) di kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan kontekstual karena berfokus pada perkembangan peserta didik yang diutamakan sebagai subjek belajar dan tempat proses belajar mengajar terjadi, menurut Sugiyanto dalam Bernard (2015:204-205) menyatakan bahwa pendekatan kontekstual terdapat tujuh isi utama dalam pembelajaran: (a) konstruktivisme: pengetahuan siswa didapatkan dari pengalaman dan pemahaman teori; (b) menemukan: di tahap ini siswa diwajibkan menemukan pengetahuan dan ketrampilan dari dirinya sendiri bukan mengingat apa yang diajarkan guru dalam tahap ini siswa mengalami tahap pengamatan; (c) bertanya: setelah siswa menemukan pengetahuannya guru dapat melakukan sesi tanya kepada siswa untuk melakukan penilaian; (d) masyarakat belajar: yang dimaksud dari ini adalah belajar bisa dilakukan kepada orang lain; (e) pemodelan: agar peserta didik tidak bingung terhadap materi yang disampaikan maka diperlukan objek; (f) refleksi: cara berpikir dengan mengingat materi yang telah disampaikan sebelumnya; (g) penilaian yang sebenarnya: tahap di mana guru memberikan penilaian terhadap konsep yang dibuat oleh siswa, jadi bisa dikatakan merupakan proses pendidikan yang di mana mendukung siswa dalam memahami materi dan makna materi pembelajaran serta mengaitkannya dengan kehidupan setiap hari. (b) kelemahan: (1) guru dituntut atau diharuskan untuk kreatif; (2) guru banyak yang tidak siap dengan perubahan; (3) beban belajar dan mengajar guru maupun siswa menjadi berat; (c) peluang: (1) dalam mutu pendidikan terdapat konsekuensi yang berdampak secara langsung terhadap perubahan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini sangat diperlukan dalam pembentukan karakter manusia Indonesia yang cerdas dan menganut prinsip demokrasi serta mampu bersaing dalam era globalisasi; (d) ancaman: (1) kurang perannya guru dalam kurikulum 2013 padahal guru merupakan komponen utama; (2) kurikulum 2013 berjarak terlalu dekat dengan proses sosialisasi dalam implementasinya sehingga banyak sekolah yang belum siap menerima perubahan. Solusi (1) ditambahkan peran guru dalam proses belajar mengajar; (2) penerapan kurikulum 2013 ke Sekolah dilakukan secara bertahap sekolah mana yang sudah siap dan mana yang belum; (3) dilakukan sosialisasi serta pelatihan terhadap guru yang masih belum terlalu bisa menggunakan teknologi.

Kebijakan publik seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 4 dan Pasal 6 terdapat: (a) kelebihan: (1) setiap penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut. (b) kelemahan: (1) meskipun menganut Undang-Undang tersebut masih banyak terjadi kasus diskriminasi karena agama; (2) masih banyak anak yang tidak bersekolah karena faktor biaya. (c) peluang: (1) menciptakan peserta didik yang toleransi; (d) tantangan: karena banyak berkembangnya paham radikalisme di Indonesia itu menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan pluralisme Menurut *The Oxford Dictionary* dalam Kumbara (2019:531) menyatakan bahwa pluralisme sebuah teori menentang kekuasaan pemerintah homogen, dengan mendukung desentralisasi. Solusi: (1) pemerataan kesejahteraan terhadap penduduk agar bisa mengakses pendidikan; (2) penanaman pendidikan karakter; (3) menanamkan sikap saling toleransi.

## **SIMPULAN**

Dalam kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan tanpa melihat status sosial orang tersebut. Kebijakan publik adalah berbagai aturan yang ada untuk kepentingan orang banyak yang prosedurnya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang pemerintahan dalam membantu untuk menerapkan tujuan awal yang sudah ditetapkan, kebijakan pendidikan

adalah suatu kebijakan yang berlaku untuk berbagai lembaga pendidikan yang di mana harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti kurikulum yang terbaru masih terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Afgani, J. (2014). Kurikulum dan Pengembangannya. *Analisis Kurikulum Matematika*, 1–34.
- Ahdiani, Y. (2013). *Metode Penelitian. Model Pembinaan Akhlak Di SMAN 20 Bandung*, (23).
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(April).
- Bernard, M. (2015). Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Penalaran Serta Disposisi Matematika Siswa SMK Dengan Pendekatan Kontekstual Melalui Game Adobe Flash cs 4.0. *Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung*, 4(2), 197–222.
- Budiman, Massie, dan Wullur, M. (2015). Identifikasi Desain Jaringan Manajemen Rantai Pasok Kopra di Kota Manado. *Identifikasi Desain Jaringan Manajemen*, 3(2), 65–76.
- Imron, A. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia* (4th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kumbara, A,A,N, A. (2009). Keanekaragaman Budaya “Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia.” *Jantra “Jurnal Sejarah Dan Budaya,”* IV(7).
- Trisnawati, Gunawan, dan Nongkeng, H. (2016). Perbandingan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 di SMAN 1 Sinjai Utara. *Mirai Management*, 1(September), 1–9.
- Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* (n.d.). Retrieved November 24, 2019, from <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.html>